

**EJEKAN POLITIK PEMILU TIGA ZAMAN (1955-2014)****Awangga Widi Wahyu Utomo**Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [awangawidi00@gmail.com](mailto:awangawidi00@gmail.com)**Rojil Nugroho Bayu Aji**S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [rojilaji@unesa.ac.id](mailto:rojilaji@unesa.ac.id)**Abstrak**

Dalam sejarah politik di Indonesia, terdapat sebuah fenomena menarik yang terjadi pada saat menjelang, pelaksanaan hingga berakhirnya pemilu. Fenomena yang dimaksud yaitu munculnya fenomena ejekan politik antar partai politik ataupun pendukung. Ejekan politik merupakan perbuatan menjelek, olok-olok, sindiran atau hinaan dalam perpolitikan dengan maksud untuk menjatuhkan lawan atau golongan lain yang berbeda kepentingan sebagai upaya untuk perebutan kekuasaan. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan-pendekatan ilmu sosial lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan komunikasi politik untuk menjelaskan ejekan-ejekan politik pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia dari tahun 1955 hingga 2014.

Penelitian ini membahas mengenai (1) Bagaimanakah bentuk varian ejekan politik pada pelaksanaan Pemilu masa Orde Lama; (2) Bagaimanakah bentuk varian ejekan politik pada pelaksanaan Pemilu masa Orde Baru; dan (3) Bagaimanakah bentuk varian ejekan politik pada pelaksanaan Pemilu masa Reformasi. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dimana proses penelitiannya meliputi pengumpulan dan penafsiran fenomena yang terjadi pada masa lampau. Penulisan sejarah mempunyai 5 tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) heuristik atau pengumpulan sumber, (3) verifikasi atau kritik sumber, (4) interpretasi atau penafsiran sumber, dan yang terakhir (5) historiografi atau penulisan sejarah berupa menguraikan hasil penelitiannya dalam bentuk deskriptif.

Selain menyajikan bentuk-bentuk ejekan politik pada pemilu dari masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan terkait fenomena ejekan politik yang dimunculkan dalam Pemilu dari masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Perbedaan tersebut terlihat dari segi penggunaan bahasa, dimana ejekan politik pada masa Orde Lama cenderung lebih vulgar dibandingkan dengan ejekan politik masa Orde Baru dan Reformasi. Kemudian persamaan dari ejekan politik pemilu tiga zaman ini terletak pada penggunaan media sebagai alat menyebarkan pesan-pesan politik dimana lebih dominan menggunakan surat kabar dan majalah.

**Kata Kunci :** Ejekan Politik, Pemilu, Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi**Abstract (Italic)**

*In the history of politics in Indonesia, there is an interesting phenomenon that occurs at the time leading up to, implementation until the end of the election. The phenomenon that arises is the emergence of the phenomenon of political satire between parties or supporters. Political satire is an act of controlling, ridicule, satire or insult in politics with the intention of bringing down opponents or other groups with different interests as an attempt to seize power. This study utilizes other social science approaches, namely by using a political communication approach to explain political ridicule in the implementation of elections in Indonesia from 1955 to 2014.*

*This study discusses (1) the forms of political satire in the implementation of the Old Order general election; (2) The form of political satire in the implementation of the New Order General Election; and (3) The form of political satire in the implementation of the General Election during the Reformation period. Then this study uses historical research methods where the research process includes collecting and collecting phenomena that occur in the end. History writing has 5 stages, namely: (1) topics, (2) heuristics or source collection, (3) collection or criticism, (4) interpretation or sources, and lastly (5) history writing in the form of outlining the results of their research in descriptive form.*

*In addition to presenting types of political satire in elections from the Old Order, New Order and Reform, the results of this study also show similarities and differences regarding the phenomenon of political satire that emerged in the elections from the Old Order, New Order and Reformation eras. This difference can be seen in terms of language use, where political satire during the Old Order tended to be more vulgar than political ridicule during the New Order and Reformation. Then the similarity of the political ridicule of these three eras lies in the use of media as a tool to propagate political messages where newspapers and magazines are more dominant.*

**Keywords:** Political Satire, Election, Old Order, New Order, Reformation Era

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari terciptanya demokrasi. Demokrasi sendiri menurut Hans Kelsen adalah sebuah sistem pemerintahan yang mana pelaksanaannya berasal dari rakyat dan untuk rakyat melalui perwakilan-perwakilan yang telah terpilih sesuai kehendak rakyat.<sup>1</sup> Pemilihan perwakilan-perwakilan ini diselenggarakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu di Indonesia telah berlangsung sebanyak 12 kali yaitu dimulai pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, hingga yang terakhir yaitu tahun 2019.<sup>2</sup> Namun dalam penelitian ini, Pemilu 2019 tidak akan dilibatkan karena peristiwa tersebut baru saja terjadi dan dikhawatirkan akan menjadi penelitian kekinian bukan penelitian dalam koridor sejarah.

Pada penulisan artikel ini, penulis tidak akan menjelaskan mengenai proses berlangsungnya Pemilu di Indonesia dari masa ke masa. Namun penulis akan memaparkan hasil analisis tentang fenomena penggunaan ejekan politik dalam pertarungan politik pada Pemilu tahun 1955 hingga tahun 2014 (periode Orde Lama, Orde Baru dan Pemilu awal Reformasi). Penulis ingin mengidentifikasi cara partai-partai politik tersebut berkampanye, mencari dan menarik massa pendukung serta menyerang partai lawan atau lawan politik dengan tujuan melemahkan posisi partai politik maupun tokoh politik tertentu. Penggunaan ejekan-ejekan politik dalam pemilu adalah hal yang unik untuk diidentifikasi dan menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Dalam sejarah politik di Indonesia, terdapat sebuah fenomena menarik yang terjadi pada saat menjelang, pelaksanaan hingga berakhirnya pemilu. Fenomena yang dimaksud yaitu munculnya fenomena ejekan politik antar partai politik ataupun pendukung. Fenomena ejekan politik ini kemudian berakibat pada terjadinya polarisasi pada masyarakat. Terjadinya polarisasi atau segregasi masyarakat ini semakin menunjukkan adanya penguatan identitas bagi masing-masing partai ataupun pendukungnya. Bagaimana cara mereka berperilaku dan berpendapat dapat langsung menunjukkan kepada siapa mereka berpihak. Masyarakat dengan mudahnya dapat melabeli seseorang termasuk pada calon pemimpin atau partai politik mana mereka berpihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Becker dalam *Study Sociology of Deviance*, untuk mengidentifikasi kejadian sejarah terkait tarik menarik kepentingan antar pendukung partai politik tertentu, bahwa pelabelan yang diberikan kepada individu akan melekat menjadi identitas baru individu tersebut.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, pelabelan atau olok-olok tersebut kemudian bersifat menguatkan polarisasi masyarakat dalam membentuk identitas diri yang melekat pada masing-masing individu yang tergabung dalam

kelompok pendukung calon pemimpin atau partai politik yang menjadi kontestan pemilu.

Penelitian ini merupakan pelengkap dari karya-karya yang sudah ada seperti, buku berjudul *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* yang ditulis oleh Feith Herbert (1955). Buku ini membahas tentang hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh Feith Herbert pada pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 yang dimulai dari masa kampanye hingga hasil akhir Pemilu. Penelitian ini menambah referensi bagi penulis terutama dalam hal berlangsungnya kampanye yang mengandung olok-olokan pada Pemilu 1955. Kemudian skripsi yang berjudul *Harian Rakyat sebagai Alat Kampanye PKI dalam Pemilu 1955* oleh Bimo Bagas Basworo (2019) dari Program Studi Sejarah, Universitas Sanata Dharma yang memaparkan penelitian tentang peranan surat kabar *Harian Rakyat* dalam kampanye politik PKI pada Pemilu 1955. Terdapat relevansi antara isi bahasan buku ini terhadap fokus penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam hal kajian tentang bentuk-bentuk kampanye dan permainan isu-isu politik yang dimunculkan pada pelaksanaan Pemilu untuk tujuan memperoleh dukungan rakyat. Terakhir, buku berjudul *Etnisitas dan Agama sebagai Isu Politik: Kampanye JK-Wiranto pada Pemilu 2009 oleh Nina Widyawati (2014)* yang menyajikan tentang isu etnisitas dan agama yang dimunculkan dalam kampanye politik pasangan JK-Wiranto pada Pemilihan Presiden 2009. Terdapat relevansi antara isi bahasan buku ini terhadap fokus penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam hal kajian tentang pesan-pesan politik yang terkandung dalam isu-isu yang dimunculkan oleh pelaku politik dalam kampanye pemilu.

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan-pendekatan ilmu sosial lainnya terhadap fenomena sejarah yaitu dengan menggunakan komunikasi politik. Pendekatan komunikasi politik ini sesuai dengan topik yang diteliti yaitu tentang fenomena ejekan politik pada pemilihan umum. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi jawaban dari persoalan-persoalan sejarah dengan bantuan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Sejarah tidak lagi hanya menjelaskan peristiwa masa lampau secara diakronis namun juga dapat menganalisis bagaimana peristiwa masa lampau tersebut dapat terjadi (aspek kausalitas). Dalam hal ini yaitu, menjawab persoalan tentang bagaimana pada pelaksanaan-pelaksanaan pemilihan umum yang terjadi dapat dimenangkan oleh calon pemimpin atau partai politik tertentu. Fenomena atau peristiwa apa yang terjadi dibalik peristiwa tersebut adalah sebuah pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bentuk-bentuk ejekan politik yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye untuk kemenangan pemilu di tiga zaman yaitu masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

<sup>1</sup> HM. Thalbah, "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen", *Jurnal Hukum* 2009, Vol. 16 No. 3, hlm. 421.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 9.

<sup>3</sup> Dadi Ahmadi dan Aliyah Nur'aini, "Teori Penjurukan", *Mediator* 2005, Vol.2 No.2, hlm. 298.

Sehingga judul penelitian ini yaitu "*Ejekan Politik Pemilu Tiga Zaman (1955-2014)*".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk varian ejekan politik dalam sejarah pelaksanaan Pemilu Indonesia masa Orde Lama?
2. Bagaimanakah bentuk varian ejekan politik dalam sejarah pelaksanaan Pemilu Indonesia masa Orde Baru?
3. Bagaimanakah bentuk varian ejekan politik dalam sejarah pelaksanaan Pemilu Indonesia masa Reformasi?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk :

1. Menjelaskan bentuk ejekan politik pada Pemilu Indonesia masa Orde Lama.
2. Menjelaskan bentuk ejekan politik pada Pemilu Indonesia masa Orde Baru.
3. Menjelaskan bentuk ejekan politik pada Pemilu Indonesia masa Reformasi.

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis  
Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk-bentuk ejekan politik dalam sejarah Pemilu Indonesia.
2. Bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah  
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk melakukan penulisan yang berkaitan dengan bentuk ejekan politik pada sejarah Pemilu Indonesia.
3. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi tentang terjadinya ejekan politik pada masyarakat akibat dari pertarungan politik pada Pemilu Indonesia dari masa ke masa.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) metode memiliki pengertian yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode penelitian sejarah adalah metode ilmiah yang menggunakan pendekatan historis. Proses penelitiannya meliputi pengumpulan dan penafsiran fenomena yang terjadi pada masa lampau.<sup>4</sup> Penelitian yang peneliti

lakukan adalah penelitian sejarah yang bersifat komparatif, yakni menunjukkan hubungan dari beberapa fenomena yang sejenis dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, peneliti akan menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan penggunaan ejekan politik sebagai kampanye dalam pelaksanaan pemilu dari masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

Penulisan sejarah mempunyai 5 tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi, (4) interpretasi, dan (5) penulisan.<sup>6</sup>

### 1. Pemilihan Topik

Menurut Kuntowijoyo, pemilihan topik sebaiknya berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.<sup>7</sup> Atas saran tersebut maka peneliti memilih topik tentang pelaksanaan Pemilu Indonesia dari tahun 1955-2014 yang memberi dampak pada tatanan kehidupan sosial masyarakat yaitu dengan munculnya ejekan politik antar kelompok pendukung.

### 2. Pengumpulan Sumber

Pengumpulan sumber (*heuristik*) adalah tahapan untuk mengumpulkan sumber-sumber data yang relevan dengan penelitian. Menurut urutan penyampaian, sumber dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.<sup>8</sup> Sumber primer adalah sumber yang berasal dari pemaparan saksi mata atau tokoh yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Keterlibatan tersebut bisa dengan menyaksikan sendiri (*eye-witness*), mendengar sendiri (*ear-witness*) atau mengalami sendiri (*the actor*) peristiwa sejarah tersebut.<sup>9</sup> Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang telah diolah terlebih dahulu. Sumber sekunder dapat berupa buku-buku, artikel-artikel, atau hasil kajian lainnya.

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini berupa surat kabar seperti *Harian Rakjat*, *Suluh Indonesia* dan *Suara Karya* yang didapatkan melalui layanan *online* permintaan *e-Jarig* koleksi surat kabar langka Perpusnas; majalah *Tempo* yang didapatkan melalui *iPusnas* (aplikasi perpustakaan digital milik Perpusnas Indonesia); portal berita *Kompas*, *Detik* dan *Liputan6* yang dapat diakses melalui *website* masing-masing; kemudian rekam jejak warganet di sosial media yang dapat ditelusuri melalui *Twitter* dan *Facebook*; artikel yang diunggah pada laman *blog* jurnalis *Kompasiana*; dokumen milik CC PKI berjudul "*PKI dan Konstituante*" yang didapatkan melalui *Marxists Internet Archive*; artikel berjudul "*Presiden Jawa*" yang ditulis dan diunggah oleh

<sup>4</sup> M. Hariwijaya, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. (Yogyakarta: Elmatera Publishing, 2017), hlm. 30, *e-Book*.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Mizan Group, 2005), hlm. 90, *e-Book*.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>9</sup> Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm. 24.



Jusuf Kalla pada *blog* jurnalis Kompasiana; rekaman kampanye Gerindra yang diunggah pada akun *channel youtube* BeritaSatu; dan buku hasil penelitian pada zamannya seperti *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* karya Faith Herbert. Pencarian sumber-sumber tersebut dilakukan secara *online* dengan menulis kata kunci yang relevan pada fokus penelitian menggunakan mesin pencarian di masing-masing aplikasi seperti *Google* dan *iPusnas* untuk mengecek apakah sumber-sumber tersebut tersedia. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil kajian lainnya yang relevan dengan fokus penelitian yang diperoleh dari Perpustakaan IAIN Kediri, *iPusnas*, dan berbagai situs jurnal *online*.

### 3. Verifikasi

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya yaitu verifikasi atau kritik sejarah atau keabsahan sumber. Verifikasi atau kritik sumber dibagi menjadi dua macam yaitu kritik ekstern (autentisitas) dan kritik intern (kredibilitas).<sup>10</sup> Kritik ekstern bertujuan untuk membuktikan keaslian sumber, sedangkan kritik intern bertujuan untuk menunjukkan bahwa sumber yang digunakan adalah sumber yang dapat dipercayai.<sup>11</sup> Pada tahap ini peneliti melakukan *crosscheck* pada sumber-sumber yang dikumpulkan. Sumber yang terkumpul harus dipastikan relevansinya dengan topik penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian isi dari sumber tersebut juga perlu dikaji ulang dan dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Kegiatan perbandingan antara isi sumber yang satu dengan sumber lainnya bertujuan untuk memverifikasi bahwa sumber tersebut tidak ditulis secara emosional sehingga menghilangkan keobjektifannya.

### 4. Interpretasi

Tahap ini merupakan kegiatan penafsiran sumber data. Terdapat dua macam interpretasi, yaitu analisis dan sintesis. Analisis adalah kegiatan menguraikan isi sumber. Dari analisis akan ditemukan fakta. Sedangkan sintesis adalah kegiatan menyatukan data-data yang diperoleh sehingga ditemukan sebuah fakta.<sup>12</sup> Fakta-fakta yang ditemukan kemudian dihubungkan sehingga didapatkan gambaran yang jelas tentang fokus penelitian. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan komunikasi politik untuk mengetahui pesan, makna dan tujuan yang terkandung dalam ejekan politik yaitu dengan menganalisa gaya bahasa dan media yang digunakan. Pada tahap ini diupayakan menghasilkan fakta yang objektif tanpa keberpihakan penulis pada pihak yang terkait.

### 5. Penulisan

Setelah mengumpulkan sumber (heuristik), menguji kebenaran sumber (kritik), dan menafsirkan fakta-fakta yang didapatkan dari sumber (interpretasi), maka kegiatan selanjutnya yaitu penulisan sejarah (historiografi) yang berarti peneliti menguraikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah yang disusun secara sistematis dan kronologis. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi sangat penting.<sup>13</sup> Maka dari itu uraian hasil penelitian tentang ejekan politik akan dipaparkan secara runtut, yaitu dimulai dari pemilu masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ejekan Politik pada Pemilu masa Orde Lama

#### a. Ejekan Politik dalam Bentuk Gambar

##### 1) Memilih PKI berarti menyerahkan Indonesia ke Asing

Sebuah poster iklan kampanye Masyumi yang dipublikasikan kembali oleh Majalah Historia dengan bersumber pada surat kabar Minggu Hikmah, berisi ejekan kepada lawan politiknya yaitu PKI. Dalam poster tersebut terdapat gambar seorang budak yang dirantai dan membawa nampan berisi globe. Budak tersebut diberi tanda PKI, sedangkan tuannya diberi tanda dengan logo komunisme. Selain itu, si tuan juga digambarkan mirip seperti Josef Stalin, Pemimpin Uni Soviet. Pada poster tersebut juga berisikan teks :

"Memilih Palu Arit berarti menjerahkan Indonesia kepada kekuasaan asing. Untuk menghindari itu, tusuklah bulan bintang!"



Gambar 1 Poster iklan kampanye Masyumi

Dalam segi bahasa dan gambar, gambar budak dengan label PKI dan tuan yang mirip dengan Stalin mengartikan bahwa PKI adalah partai politik yang tunduk kepada Uni Soviet. Gambaran ini diperjelas dengan teks "Memilih palu arit berarti menyerahkan Indonesia kepada kekuasaan asing". Palu arit merupakan logo dari komunisme (PKI), sedangkan yang dimaksud

<sup>10</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Mizan Group, 2005), hlm. 110, *e-Book*.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 104.

"kekuasaan asing" yaitu Uni Soviet. Sehingga pesan ejekan yang ingin disampaikan pada poster tersebut adalah mengingatkan masyarakat agar tidak memilih PKI dan menganjurkan memilih Masyumi dengan logonya Bulan-Bintang. Menurut Masyumi, apabila PKI menang dalam pemilu maka yang terjadi adalah Indonesia akan berada dibawah kendali kekuasaan Uni Soviet. Kemudian dari segi media yang digunakan, poster tersebut disebarakan melalui surat kabar Mingguan Hikmah yang merupakan alat propaganda Masyumi. Sehingga target penerima pesan tersebut ditujukan untuk meyakinkan masyarakat yang telah mendukung Masyumi.

## 2) Dibawah Masyumi Uang Saudara Digunting

Sebuah poster iklan kampanye PKI yang dipublikasikan kembali oleh Majalah Historia dengan bersumber pada surat kabar Harian Rakjat berisi ejekan terhadap lawan politiknya yaitu Masyumi. Dalam poster tersebut terdapat gambar "uang yang digunting" dan teks penjelasan "Dibawah kekuasaan Masjumi-PSI uang Sdr. digunting. Pilihlah PKI (logo PKI)".



Gambar 2 Poster iklan kampanye PKI

Dalam segi bahasa, digunakan gaya bahasa sarkasme dimana ejekan disampaikan secara terang-terangan. Dalam kasus ini PKI menyindir kebijakan moneter "Gunting Syafruddin" yang diberlakukan oleh Menkeu Syafruddin Prawiranegara yang juga merupakan seorang tokoh dari partai Masyumi. Kebijakan ini banyak dikritisi karena dinilai menyebabkan rakyat semakin menderita.<sup>14</sup> Sehingga pesan yang ingin disampaikan dari poster tersebut yaitu PKI meminta masyarakat untuk tidak memilih Masyumi melainkan memilih PKI karena apabila Masyumi menang akan menciptakan kebijakan yang merugikan rakyat seperti kebijakan moneter gunting syafrudin. Selanjutnya dalam segi media yang digunakan, poster kampanye tersebut dimuat dalam surat kabar Harian Rakyat yang merupakan surat kabar milik PKI sehingga penerima pesan politik ditujukan untuk

meyakinkan masyarakat yang telah memilih PKI.

## 3) Dasar kalong, sih...

Sebuah kartun politik oleh PNI yang dimuat dalam surat kabar Suluh Indonesia edisi 9 Februari 1956 berisi ejekan terhadap lawan politiknya yaitu Masyumi. Dalam poster tersebut terdapat gambar kalong besar yang tengah menggantung terbalik di pohon. Kalong tersebut digambarkan sedang terluka akibat tembakan dari dua orang yang di bawahnya. Pada kalong tersebut diberi teks B.H. yang diartikan sebagai Burhanuddin Harahap, seorang tokoh dari Partai Masyumi. Kemudian di bawah gambar juga diberi teks penjelasan "Dasar kalong, Sih....."



Gambar 3 Kartun politik PNI

Dari segi bahasa dan gambar, digunakan gaya bahasa sarkasme-asosiasi dimana Burhanuddin Harahap diumpamakan seperti seekor kalong yang besar. Perumpamaan ini merupakan sebuah ejekan kasar karena kalong adalah hewan yang dianggap merugikan manusia yaitu menghabiskan buah-buahan yang seharusnya menjadi penghasilan tambahan para petani. Penggambaran kalong yang besar memiliki makna bahwa B.H. adalah orang yang memiliki kekuasaan di pemerintahan yaitu sebagai Ketua Kabinet Burhanuddin Harahap. Kemudian penggambaran dua orang kecil yang menembak diartikan sebagai rakyat yang kecewa terhadap Kabinet Burhanuddin Harahap. Teks penjelasan "Dasar kalong, sih..." merupakan sebuah kritikan kasar bahwa kalong yang merugikan tersebut sebaiknya mati atau dalam artian lain yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap dibubarkan. Sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh kartun ini adalah ingin membangun kesadaran masyarakat akan buruknya Kabinet Burhanuddin Harahap dan menyindir lawan politiknya bahwa pemerintahannya tidak lebih baik dan sebaiknya mundur saja. Selanjutnya dari segi media yang digunakan, kartun ini dimuat dalam surat kabar Suluh Indonesia yang merupakan alat propaganda PNI sehingga penerima pesan politik

<sup>14</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Redenominasi Rupiah dalam Perspektif Hukum", *Negara Hukum* 2013, Vol. 4 No. 1, hlm. 70.



ditujukan untuk mengambil hati masyarakat untuk tetap mendukung PNI dan menyindir lawan politiknya yaitu orang-orang dari Partai Masyumi.

b. Ejekan Politik dalam Bentuk Tulisan/Artikel

1) *PKI: Kalau saudara memilih Masyumi...*

Sebuah tulisan berjudul "Kalau saudara memilih Masyumi" dimuat dalam surat kabar Harian Rakjat pada edisi 24 November 1955. Harian Rakjat merupakan alat propaganda PKI. Tulisan ini berisi tentang balasan bernada ejekan PKI atas tulisan Syafruddin Prawiranegara dalam Abadi, 16 November 1953.

*"Saudara akan memilih antara lain Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang didalam Abadi, tgl. 16 Nov '53 pernah menulis:*

*..Adanja siang dan malam, kaya dan miskin, itu adalah keadaan alam menurut takdir...*

*Sehingga memilih Masyumi akan berarti bahwa sekali Sdr. miskin, se-lama2nja Sdr. miskin. Itu sudah menurut takdir."*

Dari segi bahasa, sindiran ini menggunakan gaya bahasa sarkasme yaitu ejekan secara terang-terangan yang menyatakan bahwa "Apabila memilih Masyumi berarti bahwa sekali saudara miskin, selamanya akan tetap miskin. Karena itu adalah takdir". Kata ganti "saudara" menunjuk kepada para pembaca atau masyarakat. Makna kalimat "Itu sudah menurut takdir" adalah sebuah ejekan atas tulisan Syafruddin Prawiranegara yang menyatakan bahwa kaya dan miskin adalah takdir dari Tuhan. Menurut PKI, tulisan Syafruddin berarti bahwa Masyumi tidak dapat mengubah takdir kaya dan miskin seseorang. Sehingga apabila masyarakat memilih Masyumi, yang miskin akan tetap miskin dan yang kaya akan tetap kaya. Secara tidak langsung, PKI mengajak masyarakat untuk menolak Masyumi dan memilih PKI karena PKI adalah partai berideologi komunisme dimana mereka bekerja untuk mewujudkan adanya perubahan kehidupan rakyat yang celaka (miskin/tertindas).<sup>15</sup> Kemudian dari segi media yang digunakan, tulisan ini disebarluaskan melalui surat kabar Harian Rakjat. Sehingga target penerima pesan tersebut ditujukan untuk meyakinkan masyarakat yang telah mendukung PKI.

2) *PKI: Memilih Masyumi berarti Memilih DI*

Sebuah artikel berjudul "Memilih Masyumi berarti Memilih DI" dimuat dalam surat kabar Harian Rakjat pada edisi 8 Desember 1955. Harian Rakjat merupakan surat kabar yang digunakan sebagai alat propaganda PKI. Artikel ini berisi ejekan oleh PKI kepada Masyumi bahwa apabila masyarakat memilih Masyumi maka masyarakat secara tidak langsung juga memilih DI yang telah melakukan pemberontakan terhadap negara karena hendak mendirikan Negara Islam Indonesia. Pada

paragraf penutup dituliskan:

*"Dari pembelaan2, jang terang2an maupun jang sembunji2. Dilakukan oleh pemimpin2 Masyumi terhadap DI. Njatalah bahwa memilih Masyumi tidak akan berarti lain selain memilih DI"*

Dari segi bahasa, digunakan gaya bahasa sarkasme dimana ejekan disampaikan secara terang-terangan yaitu "Memilih Masyumi tidak akan berarti lain selain memilih DI". Sehingga pesan dapat disampaikan secara tepat sasaran yaitu meminta masyarakat agar tidak memilih Masyumi karena berhubungan dengan DI. Masyumi dan DI dianggap memiliki tujuan yang sama yaitu mendirikan Negara Islam Indonesia. Kemudian dari segi media yang digunakan, artikel ini dimuat dalam surat kabar Harian Rakyat yang menjadi alat propaganda PKI. Sehingga target penerima pesan tersebut ditujukan untuk meyakinkan masyarakat yang telah mendukung PKI.

c. Ejekan Politik secara Langsung (Verbal)

1) *Pemimpin Bukan Partai Muslim adalah Munafik dan Kafir*

Ketua Masyumi Jawa Barat, Kiai Haji Isa Ashary dalam pidatonya pada rapat umum yang diadakan dalam kampanye, sering mengejek dengan kasar bahwa pemimpin yang bukan berasal dari partai muslim adalah "munafik" dan "kafir".<sup>16</sup> Yang dimaksud bukan partai muslim yaitu partai politik yang tidak berasaskan Islam seperti PNI, PKI, Permai, dan Parkindo. Dari segi bahasa, orasi yang disampaikan Isa Ashary memiliki pesan bahwa pemimpin dari partai muslim adalah pilihan yang terbaik. Sebaliknya, pemimpin bukan dari partai muslim adalah pilihan yang terburuk. Isa Ashary membawa sentimen agama untuk mendapatkan dukungan publik. *Labeling* "munafik" dan "kafir" digunakan agar umat muslim tidak memilih pemimpin yang bukan dari partai muslim. Menurut KBBI, munafik berarti berpura-pura setia kepada agamanya namun sebenarnya dalam hatinya tidak. Sedangkan kafir berarti orang yang ingkar kepada Allah SWT. Kemudian dari segi media yang digunakan, Isa Ashary menggunakan kesempatan pada acara kampanye Partai Masyumi sehingga pesan ejekan untuk lawan politiknya dapat tersampaikan kepada masyarakat yang menghadiri kampanye tersebut.

2) *Masyumi menang : Lapangan Banteng jadi Lapangan Onta*

Pada September 1955 di Alun-Alun Lapangan Banteng, juru kampanye PKI mengejek Masyumi dalam orasinya :

*"Jika Masyumi menang, Lapangan Banteng ini akan diubah jadi Lapangan Onta"*

Dari segi bahasa, digunakan gaya bahasa sarkasme yaitu ejekan secara terang-terangan dimana kata "Lapangan Onta" bermakna sesuai

<sup>15</sup> D.N. Aidit, *PKI dan Konstituante (Pokok-Pokok Fikiran jang Dikemukakan oleh PKI dalam Kampanje Pemilihan Konstituante)*, (Jakarta: Depagitprop CCPKI, 1955), hlm. 3.

<sup>16</sup> Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm. 16.

aslinya yaitu lapangan yang dipenuhi onta. Bagi masyarakat Indonesia, onta (unta) adalah ejekan (*labeling*) yang dilontarkan kepada umat muslim yang kearab-arabab. Sedangkan "Lapangan Banteng" adalah nama sebuah lapangan yang ada di Jakarta yang saat itu merupakan tempat berlangsungnya kampanye. Sehingga pesan dari ejekan tersebut adalah apabila Masyumi menang dalam pemilu 1955, Lapangan Banteng yang saat itu sebagai tempat kampanye namanya akan dirubah menjadi Lapangan Onta. Nama "Banteng" yang identik dengan Pancasila (lambang sila ke-4) diganti dengan "Onta" yang identik dengan Arab (Islam). Sehingga pesan yang ingin disampaikan adalah jika Masyumi menang, maka Indonesia akan menjadi Negara Islam. Selanjutnya dari segi media yang digunakan, kampanye tersebut berada di Lapangan Banteng yang memang dijadikan sebagai tempat kampanye. Sehingga target penerima pesan politik ditujukan kepada masyarakat yang hadir dalam acara kampanye tersebut.

## B. Ejekan Politik pada Pemilu masa Orde Baru

### a. Ejekan Politik dalam Bentuk Tulisan/Artikel

#### 1) *Kelestarian Pancasila tak Terjamin jika PPP Menang*

Sebuah artikel berjudul "*Kelestarian Pancasila Tak Terjamin jika P3 Menang*" dimuat pada surat kabar Suara Karya edisi 14 April 1982. Suara Karya merupakan alat propaganda Partai Golkar sehingga artikel tersebut merupakan sebuah sindiran dari Golkar kepada PPP. Artikel tersebut berisi tentang kekhawatiran apabila PPP sebagai partai politik yang berideologi Islam menang, maka Pancasila sebagai ideologi bangsa akan terancam. Sehingga pesan politik yang ingin disampaikan yaitu Golkar meminta masyarakat untuk tidak memilih PPP karena dikhawatirkan akan membahayakan Pancasila dan menyarankan agar masyarakat memilih Golkar karena Golkar adalah partai politik yang berasaskan pada Pancasila. Selanjutnya dari segi media yang digunakan, artikel tersebut disebarluaskan melalui surat kabar Suara Karya sehingga target penerima pesan ditujukan kepada pembaca Suara Karya dan meyakinkan masyarakat agar tetap mendukung Golkar sebagai partai politik yang menjalankan pemerintahan.

#### 3) *Kalau PPP Menang, Indonesia takkan jadi Negara Islam*

Sebuah artikel berita berjudul "*Kalau PPP Menang, Indonesia takkan jadi Negara Islam*" dimuat dalam surat kabar Merdeka edisi 16 April 1982. Artikel ini berisi tentang pelaksanaan kampanye yang dilakukan PPP di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Juru kampanye PPP menyampaikan bahwa pemerintahan adalah milik semua rakyat bukan milik golongan tertentu. Sedangkan judul "*Kalau PPP Menang, Indonesia takkan jadi Negara Islam*" merupakan sebuah tanggapan atas sindiran yang

dilontarkan oleh pihak Golkar. Sehingga pesan politik yang ingin disampaikan yaitu PPP menegaskan bahwa apabila PPP menang, ideologi Pancasila tidak akan diganti dengan ideologi Islam. Selanjutnya dari segi media yang digunakan, artikel ini disebarluaskan oleh surat kabar Merdeka. Merdeka memberikan klarifikasi atas isu-isu atau tuduhan Golkar terhadap PPP. Penerima pesan politik ini ditujukan kepada masyarakat pembaca surat kabar Merdeka.

## C. Ejekan Politik pada Pemilu masa Reformasi

### a. Ejekan Politik dalam Bentuk Gambar

#### 1) *Meme Capres Wong Cilik vs Culik Wong*

Meme dengan gambar Joko Widodo (atas) dan Prabowo Subianto (bawah) mengandung ejekan dari pendukung Capres Jokowi kepada Capres Prabowo pada persaingan Pemilihan Umum Presiden tahun 2014. Dalam meme tersebut berisi teks yang menyatakan sebuah perbandingan antara "Capres Wong Cilik" yang berada di sebelah foto Jokowi dengan "Capres Culik Wong" yang berada di sebelah foto Prabowo.



Gambar 4 Meme dari pendukung Jokowi

Dari segi bahasa, terdapat perbedaan *labeling* antara kedua Capres dengan tujuan ingin membandingkan mana yang lebih baik. Perbedaan *labeling* tersebut yaitu Jokowi diberi label "Wong Cilik", sedangkan Prabowo diberi label "Culik Wong". Pelabelan ini dilatarbelakangi oleh penggambaran citra dari Jokowi yang dalam kampanyenya tampil sebagai pemimpin yang sederhana. Sedangkan pelabelan "Culik Wong" pada Prabowo dilatarbelakangi atas beredarnya isu tentang pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Capres Prabowo semasa menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan tuduhan telah melakukan penculikan terhadap aktivis pro-



demokrasi 1997/1998.<sup>17</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pesan yang ingin disampaikan pada meme ini yaitu ingin membandingkan bahwa Jokowi terlihat lebih layak menjadi presiden daripada Prabowo. Prabowo diejek sebagai seseorang yang kurang layak menjadi pemimpin atau presiden akibat isu yang tengah menyerangnya.

Kemudian dari segi media yang digunakan, meme ini tersebar bebas dalam berbagai sosial media seperti *Facebook* dan *Twitter*. Meme tersebut disebar secara personal oleh pendukung Jokowi untuk mengejek lawannya yang merupakan pendukung dari Prabowo. Peneliti belum bisa mengkonfirmasi siapa pembuat asli dari meme ini, namun peneliti menemukan meme ini dari akun *Twitter @MedySiregar* (21/5/2014), *@DhuroMakki* (8/6/2014) dan *@denlindu* (20/6/2014). Kemudian dari akun *Facebook TrisunuSinggih* (18/5/2014), *Boni Ta Kars* (20/5/2014), dan *Mohammad Yusril Ashidiqi* (1/7/2014). Penggunaan media sosial sebagai kampanye dinilai sangat efektif karena setiap warga negara yang memiliki akun sosial media dapat menyalurkan aspirasinya sebagai wujud dari demokrasi. Dengan menggunakan sosial media, para pendukung dapat melakukan kampanye dimana saja dan kapan saja. Dengan kemudahan ini, pesan yang ingin disampaikan untuk mendukung Capres pilihannya menjadi lebih mudah tersebar dan diakses oleh semua orang.

Ejekan politik berbunyi "*Partai Wong Cilik vs Partai Culik Wong*" juga ramai diperbincangkan oleh warganet di sosial media, salah satunya yaitu pada *Twitter* (*lampiran 1 dan 2*). Hal ini menunjukkan bahwa kampanye pemilu sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.

## 2) Cover Tabloid *Obor Rakyat* "Capres Boneka"

Dalam cover (sampul halaman) surat kabar *Obor Rakyat* termuat sebuah gambar ilustrasi dimana Capres Jokowi mencium tangan Megawati yang merupakan Ketua Umum Partai Politik PDI-P. Di atas gambar ilustrasi tersebut diberi keterangan "Capres Boneka". Gambar ilustrasi ini mengandung ejekan dari pendukung Capres Prabowo terhadap Capres Jokowi pada persaingan Pemilihan Umum Presiden tahun 2014.



Gambar 5 Cover tabloid *Obor Rakyat*

Dari segi bahasa dan gambar, pada teks "Capres Boneka" merupakan sebuah ungkapan ejekan dengan gaya bahasa metafora dimana Capres Jokowi dianalogikan sebagai "boneka" milik Megawati Soekarnoputri. Kata "boneka" pada teks tersebut memiliki makna yaitu seseorang yang dikendalikan/dikendalikan oleh orang lain yang dianggap memiliki kuasa. Penggambaran ini dilatarbelakangi oleh Megawati yang merupakan Ketua Umum PDI-P sedangkan Jokowi adalah anggota partai PDI-P. Sehingga dapat diartikan bahwa ungkapan "Capres Boneka" merupakan sebuah ejekan kepada Jokowi yang mana dianggap menjadi pemimpin yang akan dikendalikan oleh Megawati selaku pimpinan dari partai politik yang mengunggahnya. Kemudian pada ilustrasi yang menggambarkan Jokowi mencium tangan Megawati memiliki pesan bahwa Jokowi adalah seorang bawahan yang patuh kepada atasannya yaitu Megawati. Selanjutnya pada segi media yang digunakan, penyebaran ejekan ini termuat pada cover tabloid atau surat kabar "*Obor Rakyat*" yang diterbitkan di edisi pertamanya pada Mei 2014. Kemudian cover tabloid ini tersebar ke berbagai sosial media sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.

## b. Ejekan Politik dalam Bentuk Karya Puisi

### 1) *Fadli Zon: Sajak tentang Boneka*

Fadli Zon yang merupakan bagian dari kemenangan Capres Prabowo dalam akun *Twitter*-nya "@fadlizon" pada tanggal 21 April 2014 pukul 21.13 WIB mengunggah sebuah puisi berjudul "Sajak tentang Boneka". Puisi ini bertujuan untuk menyindir lawan politiknya yaitu Jokowi dalam persaingan Pilpres 2014.

<sup>17</sup> Pusat Data dan Analisis Tempo, *Pengakuan Prabowo Subianto terhadap Isu-Isu yang Menerpanya*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2018), hlm. 20.



*Sajak Tentang Boneka*

*Sebuah boneka  
Berbaju kotak merah muda  
Rebah di pinggir kota*

*Boneka tak bisa bersuara  
Kecuali satu dua kata  
Boneka tak punya wacana  
Kecuali tentang dirinya  
Boneka tak punya pikiran  
Karena otaknya utuh tersimpan  
Boneka tak punya rasa  
Karena itu milik manusia  
Boneka tak punya hati  
Karena memang benda mati  
Boneka tak punya harga diri  
Apalagi nurani*

*Dalam kamus besar boneka  
Tak ada kata jujur, percaya dan setia  
Boneka bebas diperjualbelikan  
Tergantung penawaran  
Boneka jadi alat mainan  
Bobok-bobokan atau lucu-lucuan  
Boneka mengabdikan pada sang tuan  
Siang dan malam*

*Boneka bisa dipeluk mesra  
Boneka bisa dibuang kapan saja*

*Sebuah boneka  
Tak punya agenda  
Kecuali kemauan pemiliknya*

*Fadli Zon, 3 April 2014*

Dari segi bahasa, puisi tersebut berisi sindiran kepada seseorang (Jokowi) yang dianggap sebagai boneka. Pada bait terakhir "Sebuah boneka tak punya agenda kecuali kemauan pemiliknya" merupakan sebuah sarkasme yang diungkapkan oleh Fadli Zon dengan tujuan ingin menyebarkan pesan ejekan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang dikendalikan oleh pemiliknya (Megawati) sesuai dengan agenda yang diinginkan oleh Megawati. Kemudian dari segi media yang digunakan, Fadli Zon membagikan puisinya melalui akun twitter pribadinya yang saat ini memiliki 1,6 juta pengikut.

2) *Prabowo: Asal Santun*

Prabowo Subianto yang merupakan Capres pada Pilpres 2014, dalam pidatonya pada kampanye akbar Partai Gerindra yang diselenggarakan pada hari Minggu, 23 Maret 2014 di Gelora Bung Karno, Jakarta, mengkritik atau menyindir Jokowi sebagai lawannya dengan menyampaikan sebuah puisi yang berjudul "Asal Santun".

*Asal Santun*

*Boleh bohong asal santun  
Boleh mencuri asal santun  
Boleh korupsi asal santun  
Boleh khianat asal santun  
Boleh ingkar janji asal santun  
Boleh jual negeri asal santun  
Boleh menyerahkan kedaulatan negara kepada asing asal santun*

Dari segi bahasa, puisi tersebut memiliki makna berupa sindiran dari Prabowo kepada Jokowi dan Megawati. Kata "asal santun" merupakan sindiran atas tanggapan Jokowi terhadap para pengkritiknya.<sup>18</sup> Prabowo menilai bahwa saat ini banyak pemimpi yang "bohong", "khianat", dan "ingkar janji". Ini dimaksudkan untuk menyindir Mega karena telah menghindari Perjanjian Baru Tulis yang berisi bahwa Mega akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Namun yang terjadi adalah Mega mendukung Jokowi yang merupakan anggota partainya. Sehingga pesan yang ingin disampaikan pada puisi tersebut adalah ungkapan rasa kecewa Prabowo terhadap Mega dan juga Jokowi atas pengingkaran Perjanjian Batu Tulis yang telah disepakati oleh Mega dan Prabowo. Selanjutnya dari segi media yang digunakan, Prabowo menyampaikan puisinya pada saat kampanye akbar Partai Gerindra. Sehingga target penerima pesan ditujukan kepada masyarakat yang hadir pada acara kampanye tersebut yaitu pendukung Prabowo.

c. *Ejekan Politik dalam Bentuk Tulisan/Artikel*1) *JK : Presiden Jawa*

Jusuf Kalla mengunggah sebuah artikel berjudul "Presiden Jawa" pada 1 Juli 2009 di blog jurnalis Kompasiana. Artikel tersebut berisi tentang gagasan JK mengenai sejarah presiden bangsa Indonesia yang selalu berasal dari Jawa. Kalimat utama pada artikel tersebut menyatakan:

*"Semua anak bangsa berhak memimpin bangsa ini, bukan hanya mereka yang berasal dari suku tertentu."*

Dari segi bahasa, advokasi yang disampaikan JK mengandung kritikan dengan menyinggung kedua lawan politiknya yang berasal dari Jawa yaitu SBY dan Mega pada Pilpres 2009. Selain itu dengan jargon yang dibawa JK-Wiranto "Pasangan Nusantara" semakin mempertegas bahwa tujuan dari advokasi JK ini adalah untuk memposisikan dirinya lebih unggul daripada lawan politiknya karena kedua lawan politiknya sama-sama pasangan calon yang berasal dari Jawa, sedangkan JK-Wiranto tampil sebagai pasangan yang saling merangkul antar suku bangsa. JK berharap bahwa semua anak bangsa berhak menjadi seorang

<sup>18</sup> Pada Senin, 17 Maret 2014 di Balai Kota, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jokowi menyampaikan kepada wartawan, "Biasa lah. Dalam politik diejek, dicemooh, serangan, itu sehari - hari,

biasa. Saya sudah sampaikan secara santun. Tapi lebih baik apabila, itu disampaikan secara santun. Sesuai budaya kita, tidak dengan serang-menyenang, ejek-ejekan".

presiden tanpa memandang darimana asalnya. "Maka untuk itu salah satu dari sekian banyak niat saya untuk maju sebagai kandidat presiden adalah mematahkan mitos tersebut. Karena sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di negara kita. Seluruh anak bangsa punya kesempatan yang sama untuk memimpin."

Dari segi bahasa, advokasi yang disampaikan JK memiliki pesan bahwa JK ingin mematahkan mitos "Presiden Jawa" yang selama ini melekat pada bangsa Indonesia dengan mengajak pembaca untuk memilihnya pada Pilpres 2009. Kemudian dari segi media yang digunakan, kritikan JK disebarkan melalui blog jurnalis Kompasiana yang dapat diakses secara online oleh masyarakat dengan mudah. Kemudian para pendukung JK membantu untuk menyebar luaskan artikel tersebut ke berbagai sosial media, salah satunya pada grup Facebook JK-Wiranto PASANGAN NUSANTARA.

d. Ejekan Politik secara Langsung (Verbal)

1) *Mega : SBY Poco-Poco*

Pelaksanaan peringatan puncak HUT PDI-P yang ke-35 dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Januari 2008 bertempat di Gor Sriwijaya, Jln. POM IX Palembang, Sumatera Selatan. Megawati selaku Ketua Umum DPP PDI-P dalam pidatonya menyampaikan:

*"Pemerintah saat ini, saya melihat seperti menari Poco-Poco. Maju satu langkah, mundur satu langkah. Tidak pernah beranjak dari tempatnya. Bergoyang hanya untuk menghibur orang lain"*

Sindiran atau ejekan tersebut ditujukan kepada pemerintahan SBY. SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) merupakan lawan Megawati dalam Pemilihan Umum Presiden tahun 2009. Dari segi bahasa, pada pernyataan "Pemerintah seperti menari Poco-Poco" digunakan gaya bahasa kiasan yang mengungkapkan adanya persamaan antara pemerintahan SBY dengan tarian Poco-Poco. Kemudian kritikan atau ejekan ini dipertegas dengan pernyataan berikutnya, "Maju satu langkah, mundur satu langkah. Maju dua langkah, mundur dua langkah. Tidak beranjak dari tempatnya". Pernyataan ini menggunakan gaya bahasa sarkasme dengan tujuan mengejek secara terang-terangan dan tepat mengungkapkan makna dari pesan yang ingin disampaikan. Kemudian dari segi media yang digunakan, kritikan atau ejekan yang diungkapkan oleh Megawati disampaikan pada pelaksanaan Peringatan HUT PDI-P dimana peserta yang hadir adalah anggota dan simpatisan dari partai tersebut. Sehingga Megawati sebagai juru komunikator berusaha mempengaruhi peserta yang hadir dengan mengungkapkan kritikan kepada lawan politiknya untuk tujuan memenangkan Pilpres 2009.

2) *Sutan Bhatoegana : Mega Tari Undur-Undur*

Kritikan/Sindiran/Ejekan Mega terhadap SBY dengan menyebutkan bahwa "Pemerintahan SBY bagaikan menari Poco-Poco", mendapatkan respon

dari Sekretaris FPD (Fraksi Partai Demokrat) yaitu Sutan Bhatoegana. Sutan membalas Mega dengan mengejek bahwa pemerintahan Mega lebih buruk daripada pemerintahan SBY.

*"Masih lumayan Poco-Poco ada majunya, daripada tari Undur-Undur, mundur terus"*, ungkap Sutan.

Dari segi bahasa, pernyataan "Masih lumayan Poco-Poco daripada Undur-Undur" mengandung sindiran bahwa pemerintahan SBY lebih baik daripada pemerintahan Megawati. Selanjutnya pernyataan "mundur terus" menjadi penegas alasan pemerintahan SBY lebih baik. Sindiran ini memiliki pesan bahwa pemerintahan SBY meskipun maju-mundur, namun itu lebih baik daripada pemerintahan Mega yang dianggap tidak memberikan perubahan apapun. Kemudian dari segi media yang digunakan, Sutan Bhatoegana menyampaikan sindirannya ketika diwawancarai oleh jurnalis dari media Detik.com di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sehingga penyebaran ejekan ini dimuat dalam artikel berita yang disebarkan oleh situs berita online yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Fenomena ejekan politik yang terjadi pada Pemilu di Indonesia terjadi akibat adanya persaingan antar partai politik untuk menarik dukungan masyarakat agar memenangkan Pemilu. Persaingan politik dengan saling mengejek bertujuan untuk melemahkan lawannya dan mengunggulkan dirinya sendiri. Kampanye dengan narasi ejekan/sindiran dilakukan untuk menggiring opini masyarakat dimana masyarakat diberi pemahaman tertentu atas dasar kepentingan politik masing-masing yaitu sebagai upaya memenangkan calon pemimpin atau partai politik yang didukung dalam Pemilu. Pemilu di Indonesia telah terjadi sebanyak 12 kali pada 3 periode masa yaitu (1) Pemilu masa Orde Lama (1955); (2) Pemilu masa Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997); dan (3) Pemilu masa Reformasi (1999, 2004, 2009, 2014). Pada Pemilu masa Orde Lama, bentuk ejekan politik sangat variatif mulai dari ejekan dalam bentuk gambar, tulisan/artikel, dan secara langsung/verbal. Pada masa ini, perseteruan politik paling menonjol dilakukan oleh 3 partai besar yaitu PNI, Masyumi dan PKI. Kemudian pada Pemilu masa Orde Baru, hanya ditemukan ejekan politik dalam bentuk tulisan/artikel yang dilakukan oleh Golkar dan PPP. Selanjutnya pada Pemilu masa Reformasi, bentuk ejekan politik juga sangat bervariasi sama seperti pada Pemilu masa Orde Lama. Terdapat ejekan dalam bentuk gambar, karya puisi, tulisan/artikel, dan secara langsung/verbal. Dari pelaksanaan Pemilu ketiga zaman ini terdapat persamaan dalam persaingan politik yaitu sama-sama memanfaatkan isu agama untuk dijadikan ejekan/sindiran/serangan kepada lawan politiknya. Selain itu dari segi penggunaan bahasa, ejekan politik pada masa Orde Lama terlihat lebih kasar atau vulgar

atau blak-blakan dibanding dengan ejekan politik pada masa Orde Baru atau Reformasi. Kemudian dari segi penggunaan media yang digunakan untuk menyebarkan pesan politik atau sebagai media kampanye dari masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi sama-sama menggunakan media surat kabar atau majalah. Perbedaannya adalah pada masa Reformasi surat kabar atau majalah dapat diakses melalui internet.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Arsip & Dokumen

Aidit, Dipa. 1955. *PKI dan Konstituante (Pokok-Pokok Fikiran yang Dikemukakan oleh PKI dalam Kampanje Pemilihan Konstituante)*. Jakarta: Depagitprop CCPKI

### B. Surat Kabar

Harian Rakyat, 24 November 1955

Harian Rakyat, 8 Desember 1955

Suara Karya, 14 April 1982

Pusat Data dan Analisis Tempo. 2018. *Pengakuan Prabowo Subianto terhadap Isu-Isu yang Menerpanya*. Jakarta: Tempo Publishing

Pusat Data dan Analisis Tempo. 2019. *Edisi Khusus Hari Kemerdekaan : Pergulatan Demokrasi Liberal, 1950-1959 : Zaman Emas atau Hitam*. Jakarta: Tempo Publishing

### C. Buku

Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Hariwijaya, M. 2017. *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Elmatere Publishing

Herlina, Nina. 2020. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika

Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Mizan Group

Mulyana, Deddy. 2013. *Komunikasi Politik Politik Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Prasetyo, Teguh. 2019. *Pemilu & Etika Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*. Bandung: Nusa Media

Subiakto, Henry., dan Ida, Rachmah. 2012. *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi Edisi Kedua*. Jakarta: KENCANA

Widyawati, Nina. 2014. *Etnisitas dan Agama sebagai Isu Politik: Kampanye JK-Wiranto pada Pemilu 2009*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia

### D. Jurnal Ilmiah & Skripsi

Agustyna, Marini. 2016. *Strategi Kampanye Politik Golkar pada Pemilihan Umum 1977-1987: Dalam Perspektif Pemberitaan di Surat Kabar Suara Karya dan Merdeka*. Avatara, 4(3), 864-878

Ahmadi, D., & Nuraini, A. 200. *Teori penjurukan*. Mediator: Jurnal Komunikasi, 6(2), 297-306.

Amini, Hafsari. 2013. *Kartun Politik pada Surat Kabar Suluh Indonesia (1956-1958)*. FIB UI, 1-16

Basworo, Bimo Bagas. 2019. *Harian Rakjat Sebagai Alat Kampanye PKI dalam Pemilu 1955*. Skripsi. Fakultas Sastra, Program Studi Sejarah, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Indria, Rike Ayu. 2018. *Respon Majalah Aliran Islam dan Hikmah terhadap Partai Komunis Indonesia 1948-1955*. Skripsi. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Kurnianingrum, Trias Palupi. 2013. *Redenominasi Rupiah dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Negara Hukum, 4(1), 67-85

Patji, Abdul Rachman. 2015. *"Puisi Politik" Dalam Kampanye Pilpres RI 2014*. Jurnal Masyarakat & Budaya, 17(1), 1-16.

### E. Internet

BeritaSatu. 2014. *Asal Santun, Sajak Prabowo untuk Pemimpin Pembohong*. Diakses dari : <https://youtu.be/HmiDcRMZjC0> pada 27 Januari 2021

DetikNews. 2008. *FDP: Mega Tari Undur-Undur*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-887237/fpd-mega-tari-undur-undur> pada 19 Juni 2021

DetikNews. 2014. *Diserang Soal Pencapresan, Jokowi: Adu Gagasan Saja, Itu Lebih Santun*. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-2528459/diserang-soal-pencapresan-jokowi-adu-gagasan-saja-itu-lebih-santun> pada 22 Juni 2021

Hanggoro, Hendaru Tri. 2017. *Kampanye Hitam Pemilu Indonesia*. Diakses dari : <https://historia.id/politik/articles/kampanye-hitam-pemilu-indonesia-P9jpJ/page/1> pada 27 Januari 2021

Hidayanto, Wahyu. 2013. *Kalong*. Diakses dari : [https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/wahyu.hidayanto/kalong\\_551febe5a33311be43b659ec](https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/wahyu.hidayanto/kalong_551febe5a33311be43b659ec) pada 22 Juni 2021

Isnaeni, Hendri F. 2014. *Tafsiran dan Ejekan Lambang Partai*. Diakses dari : <https://historia.id/politik/articles/tafsiran-dan-ejekan-lambang-partai-DreL6/page/1> pada 27 Januari 2021

Johari, Hendri. 2019. *Saling Hajar Masyumi-PKI*. Diakses dari : <https://historia.id/politik/articles/saling->



- [hajar-masyumi-pki-v2eW5/page/1](#) pada 27 Januari 2021
- Kalla, Jusuf. 2009. *Presiden Jawa*. Diakses dari : [https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/jusufkalla/presiden-jawa\\_54febeeea33311d11a50f9dc](https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/jusufkalla/presiden-jawa_54febeeea33311d11a50f9dc) pada 19 Juni 2021
- Keteng, Andi Muttya. 2014. Saling Sindir Prabowo vs Jokowi. Diakses dari : <https://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2026652/saling-sindir-prabowo-vs-jokowi> pada 22 Juni 2021
- Kompas.com. 2008. *Mega Kritik SBY Poco-Poco*. Diakses dari <https://amp.kompas.com/edukasi/read/2008/01/31/22274340/mega.kritik.sby.poco-poco> pada 27 Januari 2021
- Kompasiana.com. 2015. *Obor Rakyat Edisi I (5 - 11 Mei 2014)*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/ratu.adil/54f6fcb6a333112b108b45cc/obor-rakyat-edisi-i-5-11-mei-2014> pada 29 Januari 2021
- Setyawan, Eko Huda. 2014. Ini Isi Dokumen Perjanjian Batu Tulis Mega-Prabowo. Diakses dari : <https://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2023233/ini-isi-dokumen-perjanjian-batu-tulis-mega-prabowo> pada 22 Juni 2021
- Zon, Fadli. 2014. *Sajak tentang Boneka*. Diakses dari : <https://twitter.com/fadlizon/status/458247249173028865?s=20> pada 27 Januari 2021

